

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006).
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sadjijono, *Hukum Pidana dalam Jabatan: Perspektif Terbentuknya Delik*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018.
- Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Idris Patari, *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*, De La Macca, Makassar, 2015.
- Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Budhi Masturi, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 46-48.

Jurnal

Satriyo Arun Samudro, “Eksistensi dan Optimalisasi Peran OMBUDSMAN dalam Pencegahan Maladministrasi di Indonesia”, *Yustisi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 107-108.

Nabila Firstia Izzati, “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia”, *SASI*, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 182.

Muslimah Hayati, “Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 115.

Arfan Poretoka, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Caraka Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 80-81.

Kelvin Vindiga Sakti dan Kurnia Nur Fitriana, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 7.

Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 2897.

- Reni Aryani dan Chrisbiantoro, “Dinamika Pengawasan Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Ius Facti*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 447.
- Ayu Amrina Rosyada, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 103.
- Ratna Ani Lestari dan Agus Santoso, “Pelayanan Publik dalam Good Governance”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 49.
- Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 68.
- Kevin Sabri, “Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Pelayanan Disabilitas di Rumah Sakit Bakti Wara”, *Scripta*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 10.
- Muhammad Padol dan Sukamto Satoto. “Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. *MENDAPO*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 141.
- Winni Ahatri dkk. “Peran Etika Administrasi Publik dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Vol. 02, No. 02, 2024. hlm. 405.
- Nida Amalia, Hasymi Muhammad, Muhammad Khoirul Anwar, “Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 06, No. 01, 2025, hlm. 3.

- Khoirul Huda. “Kewenangan Ombudsman RI dalam Menangani Tindakan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pemerintahan”, *Jurnal Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 15.
- Yuswarni dkk, “Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik”, *AsIAN*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 165.
- Yuda Hanafi Lubis, Sholihul Abidin, Erik Syaputra Johan, “Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, *INNOVATIVE*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 6-7.
- Andi Setiawan, “Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia”, *COMSERVA*, Vol. 2, No. 10, 2023, hlm. 2157.
- Claudia Mareshky, Kanaya Ayudya Putri, Ngesti Mukti Rezeki, “Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara”, *JIPM*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 255-256.
- Debora S. Panjaitan dan Puryanto, “Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia”, *JIEE*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 93-94.
- Imam Thohari, “Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang”, *Muqaranah*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 59.
- Ahmad Junianto. “Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Al-Aqwal*, Vol. 01, No. 02, 2022, hlm. 92.

Oleksandr Batanov. et al, “Ombudsman Institute: Basic Models and Problems of Reception in Constitutional Law”, *AMAZONIA Investiga*, Vol. 9, Issue. 29, 2020, hlm. 277.

Rizkynata, Reza dan Muhammad Khoirul Anwar. (2024). *Analisis Perlakuan Pelaksanaan Saran Ombudsman Republik Indonesia dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi*. PENTAHHELIX, (2)1, 8.

Hendra Nurtjahjo, “Perbedaan Teoritis Antara Lembaga Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) Dengan Lembaga Peradilan Administrasi (PTUN)”, *SELISIK*, Vol. 2, No. 4, 2016, hlm. 47-48.

Azhar Ruddin, “Efektifitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi”, *Katalogis*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 36-37.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Skripsi

Muhamad Khoerul Umam, Skripsi: *Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020. 67-68.

Data Elektronik

Berita Resmi Statistik No. 09/01/34/Th. XXV, 30 Januari 2023.

Syipa Nurul Najmi dan Ikomatussuniah. *Mengenal Maladministrasi sebagai Bentuk Penyalahgunaan Tindakan Administrasi dalam Pelayanan Publik*, terdapat dalam https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/ilovepdf_merged-8-1.pdf. Diakses tanggal 23 Januari 2025.

<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft>, diakses pada tanggal 30 Januari 2025.

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam-> diakses pada tanggal 30 Januari 2025.

[https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pelayanan-publik-](https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pelayanan-publik-khalifah-umar)

[khalifah-umar](https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pelayanan-publik-khalifah-umar) diakses pada tanggal 30 Januari 2025.

[https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-](https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html)

[disabilitas-.html](https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html), diakses pada tanggal 19 Maret 2025.

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas)

[penyandang-disabilitas](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas), diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemenuhan-layanan-bagi-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemenuhan-layanan-bagi-disabilitas)

[disabilitas](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemenuhan-layanan-bagi-disabilitas), diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-kapasitas-ombudsman-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik)

[sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik), diakses pada tanggal 18

April 2025.

[https://lingkarsosial.org/standar-lebar-dan-kemiringan-ram-sesuai-desain-](https://lingkarsosial.org/standar-lebar-dan-kemiringan-ram-sesuai-desain-universal/)

[universal/](https://lingkarsosial.org/standar-lebar-dan-kemiringan-ram-sesuai-desain-universal/), diakses pada tanggal 24 April 2025.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan bapak Jaka Susilawahyuana, S.H. selaku Pjs. Kepala

Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tanggal 24 Desember

2024 di Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Wawancara dengan Pamorti Parasista selaku bagian dari Penerimaan dan Verifikasi

Laporan (PVL) Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tanggal 18 Maret

2025 di Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Wawancara dengan bapak Bagus Sasmita selaku bagian dari Keasistenan
Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tanggal 24 Maret 2024
di Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Wawancara dengan ibu Rizkiana Hidayat selaku bagian dari Keasistenan
Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tanggal 24 Maret 2024
di Ombudsman RI Perwakilan DIY.